

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan alat bantu program SPSS 16.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan sosial politik dan ekonomi dengan tingkat koefisien sebesar 47,8%.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan sosial politik dan ekonomi dengan tingkat koefisien sebesar 28,4%.

6.2 Saran

Laporan keuangan merupakan salah satu media penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian bisa diketahui bahwa laporan keuangan memberi kontribusi terhadap pengambilan keputusan sosial politik dan ekonomi. Mengingat pentingnya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur harus mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menyediakan akses yang mudah bagi

para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkannya, terutama bagi para pengguna internal.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hendaknya berpedoman sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, agar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang efektif dapat terwujud sehingga dapat mengatasi masalah dalam pengambilan keputusan sosial politik dan ekonomi.
2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hendaknya mampu untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara menempatkan sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang memiliki wewenang dan terlibat langsung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Anonim. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013*.
- Bandariy, Himah. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jepara)*. Skripsi Akuntansi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS Edisi 3*. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Governmental Accounting Standard Board, 1998, *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Conn.
- Ihyaul Ulum. MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Jhony, Silviana, 2012. *Faktor – Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2009-2012*, Skripsi Akuntansi Keuangan Daerah, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.
- Kawedar, Warsito. 2008. *“Akuntansi Sektor Publik”*. Semarang : Undip.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Governance*, Penerbit Andy, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana, Budy. 2010. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi D.I Yogyakarta Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi Akuntansi, Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta.
- Nordiawan, Dedi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Fokus Media, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Fokus Media, Bandung.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*, Penerbit Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta
- Sangadji, Etta dan Sophia. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sande, Pegy. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi Akuntansi, Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit: Badan Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*, Web: <http://www.dmo.or.id>.
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang - Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Penerbit Fokus Media, Bandung.
- United Nations Development Program (UNDP). 1997. Dokumen kebijakan “*Governance for Sustainable Human Development*”. Jakarta.